DINAMIKA KONFLIK ANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA DAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA

Angga Prasetiyo¹, Farida², Aulia Novemy Dhita SBK³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya
prasetyoangga084@gmail.com

Abstrak

Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI merupakan wadah organisasi yang menampung semua guru di Indonesia. PGRI memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam perbaikan kualitas guru di Indonesia. PGRI juga berperan aktif dalam pembangunan pendidikan dengan adanya universitas atau sekolah yang dikelola oleh PGRI. PGRI juga berperan dalam perlawanan guru-guru dalam kemerdekaan Indonesia. Selain itu perjuangan PGRI tidak terlepas dari dinamika setiap masa di Indonesia antara lain; masa orde lama, masa orde baru, masa reformasi sampai sekarang. Dalam sejarah berdirinya PGRI sampai sekarang tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang muncul dari faktor internal maupun eksternal. Pada masa orde lama menuju orde baru, muncul konflik dalam organisasi PGRI, yaitu dimana diakibatkan oleh ikut campurnya PKI yang menyebabkan dualisme organisasi dan kepemimpinan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PGRI mengokohkan kekuatan organisasinya dalam mempertahankan ideologi organisasi yang berlandaskan Pancasila dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PKI dalam upayanya untuk mengganggu kesetabilan organisasi PGRI. Ada dua kesimpulan penting dalam tulisan ini yaitu: 1) Organisasi PGRI sejak dibentuk memiliki dasar Ideologi Pancasila yang kokoh dan berhasil bertahan dari upaya-upaya pembubaran organisasi tersebut; 2) PGRI merupakan wadah untuk para guru dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Metodologi yang digunakan adalah kajian literature dengan mengkaji berbagai referensi terkait gerakan guru di Indonesia dan kongres-kongres PGRI. Hal penting yang harus dilakukan oleh PGRI dalam mengokohkan organisasi adalah memperkuat ideologi pancasila dan memperjuangkan kesejahteraan guru. Dalam pengambilan data penelitian ini, penulis mengambil dari beberapa sumber-sumber tertulis, dengan metode kualitatif.

Kata Kunci: PGRI, PKI, Kongres, Konflik, Perseteruan.

Abstract

The Indonesian Teachers Association or abbreviated as PGRI is an organization that accommodates all teachers in Indonesia. PGRI has a very important role in education, especially in improving the quality of teachers in Indonesia. PGRI also plays an active role in the development of education with the existence of universities or schools managed by PGRI. PGRI also played a role in the resistance of teachers in Indonesian independence. In addition, the struggle of PGRI is inseparable from the dynamics of every time in Indonesia, among others; the old order era, the new order era, the reform period until now. In the history of PGRI's establishment until now it is inseparable from the challenges and obstacles that arise from internal and external factors. During the old order towards the new order, conflict emerged within the PGRI organization, which was caused by the PKI's interference which led to organizational and leadership dualism. how the influence of the PKI in its efforts to disrupt the stability of the PGRI organization. There are two important conclusions in this paper, namely: 1) The establishment of PGRI since it was formed has a solid ideology of Pancasila and has survived the efforts to dissolve the organization; 2) PGRI is a place for teachers to fight for teacher welfare. The methodology used is a literature study by examining various references related to the teacher movement in Indonesia and the PGRI congresses. The important thing that

must be done by PGRI in strengthening the organization is to strengthen the ideology of Pancasila and fight for the welfare of teachers. In taking the data of this study, the authors draw from several written sources, using qualitative methods.

Keywords: PGRI, PKI, Congress, Conflict, Feud.

PENDAHULUAN

Usaha suatu bangsa dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan masyarakat adalah tujuan negara, maka sangat diperlukan suatu kegiatan pendidikan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kepribadian manusia di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bertujuan untuk kepentingan nasional, sangat perlu diatur secara kondusif bagi pengembangan nilai-nilai edukasi dan nilai-nilai kultural oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dalam rangka kegiatan untuk pengembangan dan pendidikan harus dibenahi secara sistematis karena pendidikan adalah sarana untuk memberikan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan atau latihan bagi perannya di masa datang. Sistem pendidikan memiliki komponen yang harus ditata dan dikembangkan secara baik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Untuk selanjutnya, memberi penjelasan secara sederhana tentang ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi. Komponen utama dalam sistem pendidikan adalah guru dan tenaga pendidik. Pada tingkat operasional dari keseluruhan kegiatan pendidikan, Penentu keberhasilan pendidikan seorang guru melalui kinerjanya pada tingkat institusional, instruksional. Hal tersebut memaknai anggapan bahwa kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek guru dan tenaga kependidikan lainnya, baik yang menyangkut kualitas profesionalnya maupun kesejahteraannya dalam suatu manajemen pendidikan yang profesional.

Guru merupakan sosok penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam setiap karakter seorang guru bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Guru juga memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh guru dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Profesi guru merupakan profesi yang memiliki tantangan dalam setiap kemajuan zaman. Pada masanya guru memiliki peranan dalam perubahan dunia. Pada tanggal 25 November 1945 sesudah kemerdekaan Republik Indonesia PGRI pun lahir. Tahun 1912 merupakan munculnya organisasi PGRI yang pada masa itu disebut dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Setelah itu pada tahun 1932 diubah

menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Dikalangan guru-guru bangsa Indonesia telah lama tumbuh semangat kebangsaan. (Kosasih,2016: 98).

Pada setiap tanggal 25 bulan November merupakan hari yang berbahagia bagi para guru di Indonesia. Hari itu diperingati sebagai hari Guru Nasional. Momen ini diperingati bertepatan dengan lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pada tanggal 25 November 1945, tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Lahirnya PGRI tak bisa lepas dalam peran vital perjuangan Indonesia saat itu. PGRI memiliki peran penting dalam meletakkan fondasi berhimpunnya guru di Indonesia. Lahirnya PGRI sendiri tidak dalam waktu yang instan. PGRI hadir dari eskalasi perjuangan yang berlangsung sejak zaman kolonial hingga puncaknya Proklamasi kemerdekaan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian guru, maka diperingati sebagai Hari Guru Nasional pada tanggal tersebut (Kosasih, 2016: 112).

Sebagai sebuah bentuk persatuan untuk menghimpun para guru, PGRI terus berkembang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, walaupun mengalami dinamika kegoncangan dalam organisasi tersendiri. Dalam pergerakan awal PGRI banyak ditemui tantangan dan hambatan yang menjadi rintangan organisasi PGRI dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi PGRI. Semangat awal pergerakan PGRI dimulai dengan diadakanya kongres PGRI ke-1 di Surakarta, pada tanggal 24-25 November 1945. Pada masa orde lama menuju orde baru, muncul konflik didalam organisasi PGRI, yaitu dimana diakibatkan oleh oleh ikut campurnya PKI yang menyebabkan dualisme organisasi dan kepemimpinan. Dimana PKI membentuk sebuah organisasi serupa dengan PGRI yaitu PGRI Non Vaksentral yang bermuatan paham komunis. Upaya PKI ini merupakan cara agar PGRI bisa runtuh dan digantikan oleh organisasi tandingan tersebut agar banyak anggota guru yang berafiliasi dengan PKI.

Perseteruan ini muncul dalam beberapa kongres-kongres PGRI. Upaya yang dilakukan orang-orang yang berafiliasi dengan PKI adalah mengganggu semua kegiatan yang dilakukan PGRI. Basis-basis kekuatan orang-orang yang berafiliasi dengan PKI terdapat di beberapa daerah di pulau Jawa, sedangkan untuk diluar wilayah jawa dukungan untuk kelompok-kelompok ini sangat kecil, bahkan tidak ada. Setelah munculnya pemberontakan PKI yang gagal pada saat itu, berakhir juga kelompok-kelompok tersebut dalam mengganggu kegiatan organisasi PGRI. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PGRI mengokohkan kekuatan organisasinya dalam mempertahankan ideologi organisasi yang berlandaskan Pancasila dan untuk

mengetahui bagaimana pengaruh PKI dalam upayanya untuk mengganggu kestabilan organisasi PGRI. Setelah terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Republik Indonesia terus berjuang menggalang persatuan dengan mengajak guru-guru di daerah untuk bergabung ke dalam PGRI. Namun, perjuangan itu tidaklah mudah karena mendapat rintangan dari pihak Belanda. Persatuan Guru Republik Indonesia merasa bangga dikarenakan Rh. Koesnan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan Sosial dalam kabinet Moh. Hatta. Peran Persatuan Guru Republik Indonesia pada masa Revolusi Indonesia adalah ikut merumuskan tujuan Pendidikan Indonesia. Sebagaimana disebutkan, diawal kemerdekaan peran organisasi PGRI menjadi sangat penting dalam menentukan Landasan dan Tujuan Pendidikan Nasional dan Sistem Sekolah serta pembentukan sebagai organisasi perjuangan yang turut serta mengawal dan mengisi kemerdekaan.

Secara singkat, perumusan masalah tulisan ini adalah: 1) Bagaimana munculnya perseteruan antara PGRI dan PKI? dan 2) Bagaimana upaya-upaya PGRI dalam memperkuat organisasi dan ideologi. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tulisan ini disusun untuk menjelaskan : 1) menjelaskan munculnya perseteruan antara PGRI dan PKI dan 2) menjelaskan upaya-upaya PGRI dalam memperkuat organisasi dan ideologi.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil menggunakan metode kualitatif. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada langkah- langkah penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari sumber- sumber tertulis. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan-golongkan ke pola- pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan akhirnya secara tepat sesuai dengan permasalahan fokus utamanya.

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan, dari data yang kompleks ke

dalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami. Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalahn usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola- pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sejarah Gerakan Guru di Indonesia

Munculnya pergerakan guru di Indonesia dapat kita ketahui pada saat penjajahan Portugis, dimana pada saat itu didirikannya sekolah pertama oleh orang Portugis di pulau Ambon, Maluku pada tahun 1536.(Supriadi, 2003:7). Pada masa penjajahan portugis, organisasi pergerakan guru sudah terbentuk. akan tetapi pada umumnya mereka merupakan para guru Agama Katholik Ordo Jesuit dan Dominikan. Maka dari itu, Organisasi itu dinamai gerakan guru Ordo Jesuit dan Dominikan. Gerakan guru-guru pada saat itu mampu memrealisasikan apa yang ingin orang-orang Portugis capai, yaitu penyebarluasan Agama Khatolik yang didalamnya ada ajaran Ordo Jesuit dan Dominikan.

Ketika penjajahan kolonial Inggris di Indonesia, organisasi guru-guru mengalami kemunduran dan tidak terorganisir, hal ini disebabkan oleh pemerintahan Raffles pada saat itu lebih ingin menuju kepada penelitian tentang pulau Jawa yang dilakukan oleh Raffles sendiri. maka dari situlah yang menyebabkan organisasi-oraganisasi guru menjadi melemah. Sedangkan pada masa penjajahan Belanda, Gerakan oraganisasi guru muncul ditandai dengan terbentuknya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang selanjutnya akan berganti menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Organisasi PGHB merupakan organisasi yang akan menajdi PGRI dikemudian hari. Awal perjuangan organisasi guru pada masa penjajahan Belanda dimaulai pada tahun 1894, yang ditandai dengan munculnya organisasi Kaum Pekerja Upah Pertama sebagai guru sekolah dasar dan menengah Belanda (Tedjasukmana, 2008:8).

Kumpulan para pekerja ini bernama *Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap* (NIOG). Organisasi ini masih memiliki keterikatan dengan pemerintahan Belanda dan tidak memilki pengaruh penting dalam pergerakan buruh di Indonesia. NIOG menjadi suatu serikat para guru yang kecil di sejumlah sekolah swasta Belanda. Saat itu, dengan dikeluarkannya para guru Belanda dari sekolah-sekolah publik setelah berdirinya Republik. Oganisasi NIOG pada tahun 1956 sudah terdaftar dengan enam cabang dan anggota 320 individu. Organisasi ini menjadi dasar pertama bagi

pergerakan para guru di Indonesia. Pada tahun 1912 terbentuklah Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) dipimpin oleh Karto Soebroto. yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah dan organisasi ini bersifat unitaristik. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat. PGBH memiliki tantangan dalam memperjuangkan kesejahteraan nasib para anggota yang terdiri dari pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda, hal tersebutlah yang menjadikan tantangan dalam memperjuangkan kesejahteraan para guru. (Supriadi, 2003:65).

Banyaknya permasalahan dalam negeri terutama dalam sosial dan politik, membuat sulitnya terciptanya kesatuan dalam perjuangan guru, sehingga muncul perpecahan dalam proses pergeakan yang dari awal memiliki banyak tantangan dan hambatan. Sehingga muncul sebuah organisasi PGHB yang merupakan wujud perkembangan dalam pergerakan para guru di Indonesia yang akan berubah menjadi PGI pada tahun 1932. Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia (Yunus, 2003:34). Akan tetapi perkembangan struktur organisasi secara formal yang terdapat dalam PGI, pada masa penjajahan Jepang mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan pemerintah Jepang pada saat itu memrintahkan untuk melarang dan menutup semua kegiatan organisasi PGI. Sehingga segala kegiatan pendidikandan politik berhenti. Masalah tersebut tidak bertahan lama, ketika Jepang takluk terhadap sekutu, semua kegiatan dalam pembelajaran di sekolah kembali dibuka. akan tetapi pembukaan kembali kegiatan di sekolah-sekolah tersebut sangat bermuatan politis yang membawa misi Nipponisasi dan pemberdayaan bangsa Indonesia untuk perburuhan dan mobilisasi militer (Yunus,2003:78).

Munculnya PGRI merupakan adanya kesadaran dari organisasi-organisasi guru yang kecil untuk berjuang, karena ketika mereka masih dalam bentuk faksi-faksi kecil mereka lebih mudah untuk dipatahkan dan hapuskan oleh kepentingan kekuasaan pemerintahan pada saat itu. Akhirnya dengan meleburka semua perbedaan yang terdapat dalam diri mereka akhirnya terbentuklah organisasi PGRI. Ketika pada saat situasi sosial-politik zaman penjajahan, PGRI kental sekali dengan perjuangan kemerdekaan, membela bangsa dan negara. Semangat tersebut menggambarkan bahwa ciri khas perjuangan PGRI merupakan dasar organisasi. Selain itu PGRI

merupakan organisasi profesi yang berlandaskan pada pengetahuan, keterampilan, pengakuan orang lain. Serta organisasi ketenagakerjaan, tidak bisa dipisahkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Organisasi PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang merupakan awal kongres PGRI ke-1 dan menjadikan pengaruh PGRI dalam pergerakannya. Munculnya organisasi PGRI merupakan awal dari dasar pergerakan para guru di Indonesia yang diawali dengan berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Rasa semangat kebangsaan Indonesia yang sudah ada dalam diri para guru telah lama memendam dalam hati mereka, sehingga terbentuklah organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1912 yaitu PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda). yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah dan organisasi ini bersifat unitaristik. Setelah munculnya PGHB muncul dan berkembang organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya.

Kemerdekaan Indonesia merupakan hal penting yang menjadi modal utama dalam memacu semangat perjuangan dan jati diri para guru Indonesia. Jelas semangat mengisi hari depan Indonesia hanya bisa dihidupkan terus melalui proses kemajuan pendidikan. Para guru Indonesia menyadari betul semangat kemerdekaan sebagai perisai yang ampuh bagi proses perwujudan persatuan guru-guru Republik Indonesia. Motivasi ini pula yang mendorong proses lahirnya organisasi guru yang diharapkan bakal menjadi embrio bagi penerusan cita-cita kemerdekaan. (Supriadi, 2003:65). Setelah Indonesia merdeka, semangat melanjutkan profesi keguruan dilanjutkan oleh orang-orang pribumi Indonesia. Kehadiran organisasi para guru sebagai wadah dan sarana kaum guru yang sedang berevolusi kemerdekaan, merupakan manifestasi akan keinsyafan dan rasa tanggung jawab kaum guru Indonesia dalam memenuhi kewajiban akan pengabdianya serta partisipasinya kepada perjuangan menegakan untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Hadiatmadja, 2000:19).

Semangat perjuangan organisasi Guru-guru Indonesia diawal perjuangannya tidak hanya mengadakan kongres pertama untuk mendirikan PGRI. Pada tahun-tahun berikutnya telah berhasil dilaksanakan beberapa kongres yang sangat artinya perumusan perjuangan PGRI. (PGRI, 2010:12). Akan tetapi dalam setiap kegiatan organisasi PGRI selalu dipenuhi tantangan dan hambatan, seperti pada masa Orde Lama dimana munculnya Partai Komunis Indonesia membuat PGRI mendapatkan gangguan. PKI

menganggap PGRI merupakan musuh mereka, karena PGRI masih mempertahankan Ideologi Pancasila. PKI berupaya menghentikan laju gerak PGRI, dengan membuat para anggota-anggota PGRI yang berafiliasi dengan PKI membuat gerakan untuk tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan PGRI. Gangguan- gangguan dari PKI ini sudah muncul dari beberapa kongres-kongres yang diselenggarakan PGRI, antara lain kongres ke-7 sampai kongres ke-11.

b. Munculnya Perseteruan PGRI dan PKI

PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) adalah satu-satunya organisasi yang anggotanya merupakan guru-guru sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas dan sebagainya yang tersebar diseluruh penjuru daerah sampai desa- desa. Anggota PGRI di setiap daerah memiliki status sosial politik yang cukup tinggi, hal tersebut membuat PGRI menjadi incaran PKI untuk diinfiltrasi dan dikuasai dari dalam seperti orgainsasi-organisasi lainnya. Ketika usaha penguasaan PGRI dari dalam tidak berhasil, PKI pada tahun 1963 mengadakan PGRI tandingan yang diberi nama PGRI Non-Vaksentral di bawah pimpinan Subandri dan Muljono, yang mendapat sokongan dari menteri P&K dan Sekjen P&K. Sampai dibubarkannya, setelah pemberontakan G30S/PKI, PGRI Non-Vaksentral kurang berhasil mendapat dukungan dibandingkan PGRI yang asli, terutama diluar pulau Jawa (Poesponegoro Notosusanto, 1993: 370).

Dalam gangguannya PKI melancarkan beberapa gangguan agar kegiatan PGRI terhambat yaitu dengan mengintuksikan agar setiap kongres-kongres PGRI setiap anggotanya yang berafilisasi untuk mempengaruhi anggota lainnya untuk tidak hadir dalam kongres tersebut dan memharapkan mereka bergabung dengan mereka dengan membuat organisasi PGRI-Non Vaksentral. Pada bulan-bulan pertama sesudah kongres IX, PGRI menghadapi kesulitan besar terutama karena kekurangan dana. Bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil (Rp 150), melainkan pemasokan dana dari jawa tengah dan jawa timur sangat seret. Dari beberapa cabang yang setia dengan PB PGRI dikedua provinsi tersebut diserobot oleh pengurus daerah yang Pro-PKI. Meskipun demikian kegiatan PGRI berjalan dalam upayanya memperjuangkan nasib para guru. (Rahmad.Hidayat, 2013: 24).

c. Lahirnya PGRI Non-Vaksentral/PKI

Periode tahun 1962-1965 mulai muncul keretakan dalam internal PGRI yang lebih dominan dari pada masa-masa sebelumnya, hal ini menyebabkan dualism didalam PGRI. Saat awal perpecahan dalam PGRI mengalami banyak masalah terutama dalam pembiayaan kegiatan dan pergerakan PGRI. Meskipun demikian, kegiatan PGRI tetap berjalan dalam upaya memperjuangkan nasib para guru. Terdapat beberapa masalah dari luar yaitu dukungan PGRI terhadap masuknya PSPN ke dalam SOKSI yang harus diputuskan dengan cara voting dan menghasilkan 12 suara pro dan 2 suara kontra. Hal tersebut tidak secara menyeluruh meruntuhkan kekompakan dilingkungan Pengurus Besar PGRI.

Ketegangan yang terjadi didalam PGRI yaitu pada saat setelah Pengurus Besar PGRI ikut serta dalam Musyawarah Penegasan Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Nasional. Setelah PGRI ikut serta dalam Musyawarah Penegasan Pancasila tersebut, tak berapa lama dari itu muncul nota pengunduran diri Moejono dan Ichwani. Setelah peristiwa tersebut kemudian kelompok-kelompok soebandri, Moejono, Ichwani segera mengadakan rapat sebagai upaya agar mereka tetap pada pendiriannya. Apabila rapat tersebut tidak terlaksanakan dan terlambat mereka tidak bisa lagi menggunakan dalih Non-Vaksentral sebagai senjata dan patokan propaganda mereka terhadap organisasi PGRI. Selain upaya melalui PGRI untuk penyusupan mereka juga terhadap aparatur pendidikan yang ada dalam aparatur Departemen P & K, oleh sebab itu munculah pemecatan massal Pejabat Departemen PP & K pada tahun 1964. Sistem pendidikan Pancawardhana (pidato inaugurasi Dr. Busono Wiwoho) dilandasi dengan prinsip-prinsip:

1. Perkembangan dan pengembangan rasa cinta bangsa dan tanah air
2. Perkembangan dan pengembangan kecerdasan peserta didik
3. Perkembangan dan kontrol emosional-artistik
4. Perkembangan dan kemampuan dalam keprigelan/kerajinan tangan, dan
5. Perkembangan jasmani dan rohani.

Isi pidato membuat pertentangan dan kegelisahan dikalangan pendidik. Sehingga dikeluarkannya Keputusan Presiden 4/08/1964 yang berdasarkan usulan dari Menteri P & K tentang Reorganisasi Departemen P & K yang merubah tatanan pembantu Menteri P & K dari 3 menjadi 2 orang. Sehingga 28 pegawai tinggi Departemen P & K mengirim surat kepada Menteri Prijono dengan tujuan untuk membersihkan kembali struktur P & K. Surat tersebut berimbas pada memberhentikan 27 pejabat tersebut dengan

alasan “atas dasar permintaan sendiri”. Akibat pemberhentian tersebut berbagai ormas dan beberapa wakil dari Dinas P & K memprotes keras keputusan pemberhentian tersebut.

d. Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI

Pada saat penerapan pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959, Situasi demokrasi yang terjadi didalam negeri Indonesia mengalami banyak pembaruan dan perubahan yang merupakan sebagai tolak ukur dari ajang demokrasi Indonesia pada saat itu, hal tersebut dimunculkan dengan banyaknya partai-partai yang berdiri dalam pemilu saat itu. Pada saat menjelang Pemilu tahun 1955, pertarungan antar partai politik benar-benar panas dan tidak jarang secara terbuka saling menyerang dengan berbagai propaganda, terutama antara Masyumi dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah Pemilu tahun 1955, keadaan bangsa Indonesia tidak kunjung mereda namun jauh semakin panas. Sehingga muncul stigma bahwa PKI disebut-sebut sebagai "Partai Anak Emas" oleh Presiden Soekarno. Pada masa itu sangat sulit bagi setiap warga negara untuk menjadi seorang independen dan tidak terikat pada arus politik Indonesia yang sedang menggebu-gebu tersebut, termasuk pada kalangan guru.

Tingginya tensi politik dalam negeri yang terus memanas membuat guru kehilangan rasa persatuan, hal tersebut terbukti dengan munculnya berbagai organisasi- organisasi guru lain seperti Ikatan Guru Marhaenis, Persatuan Guru NU, Persatuan Guru Islam Indonesia, dan seterusnya. Pengurus Besar PGRI mengecam hal ini dengan menuduh bahwa organisasi-organisasi tersebut merupakan tindakan untuk memntingkan parati yang mereka dukung dan terlalu sibuk dengan ideologi serta partai yang sealau menyokongnya, sehingga mereka lupa terhadap organisasi profesi dan yang lebih penting fokus pada tugas utamanya. Akhirnya organisasi PGRI mengalami perpecahan karena perbedaan cara pandang terhadap afiliasi politik. Sebelumnya PGRI sejak tahun 1959 sudah terdapat banyak masalah, antara lain yaitu adanya guru-guru yang condong pada suatu partai politik tertentu, dan yang paling kuat dalam melakukan pandangan politiknya di forum-forum PGRI ialah yang bersimpati pada PKI.

Pada Kongres ke X di Jakarta November 1962, pada masa itu kondisi PGRI ini semakin panas dan meruncing. Soebandri yang dianggap orang PKI ditubuh PGRI, Soebandri diduga menuduh ketua umum M.E. Subiyadinata anti Manifesto Politik yang saat itu menjadi kebijakan politik Presiden Soekarno. Sebenarnya usaha Soebandri dan komplotannya ini tujuannya jelas untuk menurunkan Subiyadinata dari kursi Ketua

Umum PGRI dan mungkin dirinya atau setidaknya kekuatan PKI yang bisa berkuasa selanjutnya. Karena usahanya gagal, pada Juni 1964 organisasi itu pecah dengan terbentuknya PGRI Non-Vaksentral yang terdiri dari guru-guru pendukung garis politik Presiden Soekarno dan kadung dicap sebagai "PGRI nya PKI" paska 30 September 1965.

Pada kongres IX PGRI di Surabaya (oktober 1959), infiltrasi PKI kedalam tubuh PGRI benar-benar terasa, dan lebih jelas lagi dalam kongres X di Jakarta (November 1962). Kiranya perinsip "siapa kawan siapa lawan" berlaku pula dalam tubuh PGRI. "Kawan" adalah semua golongan pancasilaisanti PKI yang Dalam Pendidikan mengamankan Pancasila, dan "Lawan" adalah PKI yang berusaha memnaksakan pendidikan."pancacinta" dan "pancatinggi". Akan tetapi kekuatan pancasilais d.PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut. Setelah PKI diwakili oleh guru-guru berorientasi ideologi komunis tak mampu lagi melakukan taktik-taktik penyusupan terhadap PGRI, mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang-terangan untuk memisahkan dari PGRI.

Setelah PKI yang diwakili oleh guru-guru berorientasi ideologi komunis tak mampu lagi mealkukan taktik – taktik penyusupan terhadap PGRI, mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang-terangan untuk memisahkan diri dari PGRI. Mereka kemudian menyebut dirinya PGRI Non-Vaksentral (PGRI NV). Pergolakan hebat yang ditimbulkan oleh munculnya PGRI NV terasa benar didaerah. Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai ancaman dan perpecahan dikalangan guru, Presiden Soekarno turun tangan dengan membentuk Majelis Pendidikan Nasional yang menerbitkan Penpres (Penetapan Presiden) No. 19 tahun 1965 tentang Pokok - pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari Panitia Negara untuk Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana. Tetapi bagi PGRI penpres tersebut tidak berhasil mempersatukan kembali organisasi ini.

e. PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI

Peristiwa G30S/PKI merupakan puncak dari apa sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI, yaitu perebutan pengaruh anti PKI dan pro dengan PKI. Bersama para pelajar, mahasiswa, sarjana, para guru anggota PGRI turun kejalan dengan meneriakkan Tritura (Tri Tuntunan Rakyat). Mereka membentuk kesatuan-kesatuan aksi, seperti KAMI, KASI, sedangkan para guru-guru membentuk KAGI pada tanggal 2 februari 1966. Perlu ditambahkan bahwa KAGI pada mulanya terbentuk di Jakarta Raya

dan Jawa Barat, kemudian berturut-turut terbentuklah KAGI di wilayah lainnya. Tugas Utama KAGI antara lain:

1. Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur PKI dan orde lama.
2. Menyatukan semua guru d.dalam organisasi guru yaitu PGRI.
3. Memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unotalistik tetapi juga independen dan non partai politik.

Bukti keberhasilan kekuatan orde baru dalam kongres ini terlihat dari hasil-hasil kongres di bidang unsure atau politik atau PB PGRI masa bakti XI adapun hasil-hasil kongres XI adalah:

1. Menjunjung tinggi HAM
2. PGRI diwakili secara resmi dalam DPRGR atau MPRS
3. Front nasional dibubarkan
4. PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat Unitaristik, Independen dan Non Partai Politik
5. Intensifikasi penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers, Radio, TV dan Majalah Suara Guru
6. Pendidikan kader organisasi secara teratur dan terencana
7. PGRI menjadi anggota WCOTP

Pada tahun 1969 atas perdesakan nasib guru yang d.bentuk PGRI, pemerintah setuju untuk mencairkan tunjangan kelebihan mengajar bagi guru-guru SD di seluruh Indonesia. Hubungan PGRI dengan organisasi guru mulai di rintis kembali. Pada bulan juli 1966 secara resmi diterima menjadi anggota WCOTP dalam kongres guru se-Dunia di soel, Korea selatan. Setelah itu, PGRI diundang untuk mengikuti tradeunionleader course di negeri belanda selama 4 bulan, kursus di adakan 2 angkatan yaitu Angkatan 1 pada tahun 1969 dan angkatan 2 pada tahun 1970. Ironisnya guru-guru yang semula di PGRI kemudian banyak yang eksodus, baik pendukung PKI atau bukan, PGRI Non-Vaksentral perlahan memiliki masa yang cukup khususnya dari kalangan guru di Jawa. Sebaliknya PGRI terpaksa bermanuver mendekati kubu tentara yang saat itu memang saling menabuh genderang perang dengan PKI, sehingga independensi dan kemandirian PGRI kemudian juga patut dipertanyakan.

Pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang terpusat di Jakarta membawa sinar redup bagi PGRI Non-Vaksentral. Kelanjutan organisasi ini pun dapat

ditebak dengan mudah, hancur seiring pemberangusan PKI dan anasir-anasirnya. Termasuk PGRI Non-Vaksentral yang ditumpas habis sekitar tahun 1966-1977 oleh tentara. Sebagian besar di penjara tanpa pengadilan, mungkin ada yang ditembak mati dan "dihilangkan" tidak jelas rimbanya. Padahal tidak semua dari anggota PGRI Non Vak-Sentral terlibat dalam peristiwa tersebut, bahkan tidak semuanya adalah pendukung PKI. Seorang guru yang dahulu menjadi anggota PGRI Non Vaksentral.

Periode tahun antara 1966-1972 merupakan masa perjuangan untuk turut menegakkan Orde Baru, penataan kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola pembangunan nasional yang baru memerlukan pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemampuan manajerial yang mantap, dan pengalaman yang mendukung. Dipenuhi dengan jalan kaderisasi, pelaksanaan kaderisasi yang dimulai pada th. 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur. PGRI mencoba untuk turut memprakarsai dan menghimpun organisasi-organisasi pegawai negeri dalam bentuk RKS. Selanjutnya PGRI memprakarsai pendirian PSPN dengan ketua Umumnya M.E. Subiadinata. Terakhir, pada th. 1967, PGRI memprakarsai berdirinya MPBI. Sebagai pengembangan dari MPBI lahirlah FBSI. Disambut gembira oleh para buruh kelahiran FBSI, sementara PGRI tidak mempunyai tempat dalam federasi karena banyak perbedaan yang mendasar pada yaitu; 1) FBSI beranggotakan unsur buruh murni; 2) Anggota FBSI harus buruh swasta; 3) FBSI berprinsip "trade unionisme"; dan 4) FBSI berada di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja.

KESIMPULAN

Apa bila kita dengan sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk meneliti kembali secara cermat gagasan-gagasan, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya sampai sekarang maka kita temukan kembali bahwa pada hakikatnya PGRI adalah sebuah organisasi profesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada khususnya berdasarkan pengamatan pertahun, tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan strategi yang bersifat kuantitatif, dalam arti menggalang masa secara politis, terutama waktu menjelang pemilu. Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas dari pada kuantitas (jumlah anggota). Sementara peningkatan kualitas profesi di perlukan oleh para guru para semua jenis dan jenjang pendidikan untuk itu, PGRI di tuntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh para

guru sekolah menengah, dan bahkan para dosen di perguruan tinggi. Setelah terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Republik Indonesia terus berjuang menggalang persatuan dengan mengajak guru-guru di daerah untuk bergabung kedalam PGRI. Namun, perjuangan itu tidaklah mudah karena mendapat rintangan dari pihak Belanda. Persatuan Guru Republik Indonesia merasa bangga dikarenakan Rh.Koesnan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan Sosial dalam kabinet Moh. Hatta.

Peran Guru Republik Indonesia pada masa Revolusi Indonesia adalah ikut merumuskan tujuan Pendidikan Indonesia, serta meletakkan dasar bagi pendidikan yaitu dijadikannya Pancasila sebagai landasan ideologi Pendidikan. Negatif di luar PGRI pada dasarnya positif, namun yang perlu dicermati bahwa lahirnya PGRI pada tahun 1945 sendiri sebenarnya merupakan gabungan dari organisasi-organisasi guru yang ada saat itu. Artinya dalam konteks ini, keberadaan gerakan atau organisasi guru alternative selagi memberikan kontribusi bagi perjuangan guru, corak boleh berbeda tapi satu tujuan. Memberikan warna dan sebagai sparing partner/ penyeimbang, bukan pesaing. Sebab jika itu terjadi salah-salah kita seperti sapu yang bercerai-berai. Gerakan-gerakan mereka sejauh ini baru sebatas membentuk sebuah lembaga yang tidak terlalu ketat dan cenderung longgar. Mereka cenderung masih sangat lemah organisasinya dan tidak terkelola dengan baik. Tidak sedikit mereka sangat terkooptasi oleh kekuasaan dan politik.

Selain itu mereka juga tidak kuat dana pengelolaan. Lebih dari karena mereka masih terjebak dengan struktur kelembagaan, mereka cenderung tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang memperbarui kondisi saat ini. Belum lagi, meski keberadaan mereka didukung secara legal oleh UU Guru dan Dosen, regulasi yang masih belum memperjelas posisi serikat guru. Selain itu, faktor jaringan juga sangat menentukan. Keberhasilan sebuah gerakan pro demokrasi sangat bergantung kepada kesanggupannya untuk mengaitkan dirinya dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi besar yang ada di pusat. Sejalan ini gerakan guru di Indonesia dalam kondisi membuka jaringan di masing-masing daerah, meski itu belum maksimal dilakukan. Singkatnya, dua hal menjadi penting. Pertama, masalah kelembagaan merupakan hal penting bagi gerakan guru di Indonesia pasca Soeharto. Seperti mengutip Törnquist, gerakan yang melembagakan perjuangannya secara professional akan punya nafas yang lebih panjang. Kedua, penguatan jaringan merupakan faktor penting lainnya untuk diperhatikan gerakan

guru di Indonesia pasca Orde Baru. Jaringan yang luas bukan saja secara nasional tapi juga secara internasional, akan sangat memperkuat gerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiatmadja, R. A. Soepardi., dkk., 2000. *Pendidikan Sejarah Perjuangan PGRI (PSP-PGRI), Jilid II, III, IV, V*. Semarang : IKIP PGRI.
- Hidayat, Rakhmat. 2011. *Dinamika Sosial Gerakan Guru di Indonesia*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono. dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kosasih, Ahmad. 2016. *Perjuangan Organisasi Guru di Masa Revolusi Sejarah PGRI di Awal Pendiriannya*. Bali: Universitas Indraprasta PGRI.
- PGRI, 2010. *Buku Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI 2010*. “*Sejarah Lahirnya PGRI Dan Kongres PGRI* (<http://pgrikarangtengah.blogspot.com/2010/07/tujuan-organisasi-pgri.html/>) Diakses pada 22 Mei 2014.
- Poespongoro, Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tedjasukmana, Iskandar. 2008. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia* (terjemahan Oey Hay Djoen). Ithaca: Seri Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Far Eastern Studies Cornell University.
- Yunus, 2003. *PGRI dari Masa ke Masa*. Jakarta: PGRI YPLP.